

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntansi**

Menurut Weygandt dkk (2019:3) akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan.

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Akuntansi adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan), hal yang berhubungan dengan akutan serta seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai proses pencatatan, pengolongan, peringkasan transaksi keuangan dan penginterpretasikan hasil proses tersebut.

##### **2.1.2. Pengertian SAK EMKM**

Pada tanggal 1 Januari 2018 DSAK IAI akan memberlakukan SAK baru khusus untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM diterbitkan untuk membantu EMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya 57 juta serta memberikan kontribusi terhadap pertumbungan ekonomi Indonesia hingga 60%.

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Dalam SAK EMKM mengatakan bahwa entitas mikro kecil dan menengah tanpa adanya akuntabilitas publik yang signifikan, seperti yang ditetapkan dalam SAK EMKM yang memenuhi definisi serta kriteria ekonomi mikro kecil dan menengah sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia paling tidak selama dua tahun berturut-turut. Dalam SAK EMKM juga dikatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi diizinkan untuk menggunakan SAK EMKM jika otoritas yang terkait mengizinkan.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK EMKM jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK EMKM.

Ketentuan yang ada dalam UU No 20 Tahun 2008, selain terkait kekayaan bersih dan omset, ada dua hal penting yang perlu di ketahui yaitu:

1. Usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung
2. Tidak memiliki atau menguasai mitra usahanya.

Penyajian terhadap laporan keuangan UMKM telah disusun secara rinci pada SAK EMKM. Oleh karena itu, Satria dan Jery (2020:70) menjelaskan penyusunan secara rinci tersebut ialah penyajian yang harus memenuhi :

1. Kriteria komparatif yang dapat terpenuhi apabila suatu laporan keuangan menyajikan minimum dua periode untuk tiap unsur laporan keuangan.
2. Kriteria konsisten yang dapat terpenuhi apabila dari periode ke periode laporan keuangan tersebut disusun, dan disajikan dengan standar pelaporan yang sama secara kontinyu, kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas entitas atau standar yang berlaku.

Menurut Satria dan Jery (2020:71) juga menjelaskan, bahwa laporan keuangan dapat dikatakan lengkap menurut SAK EMKM, apabila :

1. Laporan keuangan tersebut minimal terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi selama periode.
3. Catatan atas laporan keuangan yang memuat tambahan, serta rincian akun-akun tertentu yang memiliki relevansi.

Menurut Afifah (2021:2) Kehadiran SAK EMKM ini sangat tepat di era sekarang mengingat pesatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tentu membutuhkan sebuah standar yang baku dalam mencatat transaksi keuangan mereka. Dengan munculnya SAK EMKM ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu segera melakukan penyesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan.

Menurut Handayani (2018:9) SAK EMKM memiliki manfaat dan tujuan yang dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.

Standar EMKM ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunanya yang merupakan perusahaan dalam golongan usaha kecil dan menengah. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, di mana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan, hal ini berdasarkan penelitian Afifah (2021:3)

### **2.1.3. Laporan Keuangan SAK EMKM**

Menurut Kasmir (2019:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

Menurut PSAK No. 1 (2015:2) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasnya laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan atas laporan keuangan dan laporan lain sertamateri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Laporan Keuangan juga secara umum bertujuan menyediakan informasi tentang posisi keuangan kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomiatau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode

Laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca menyajikan asset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suatu saat tertentu. Laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur – unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Adapun akun-akun yang termasuk dalam aset :

1) Asset lancar

- a) Kas yang tersedia untuk usaha sekarang dan elemen yang dapat disamakan dengan Kas, misalnya cek, money order, pos wesel, dan lain-lain
- b) Surat-surat berharga yang merupakan investasi jangka pendek
- c) Piutang dagang dan Piutang wesel
- d) Piutang pegawai, anak perusahaan dan pihak lain jika diterima dalam waktu satu tahun
- e) Piutang angsuran dan piutang wesel angsuran, jika merupakan hal yang umum dalam perdagangan dan akan dilunasi dalam jangka waktu satu tahun.
- f) Persediaan barang dagang, bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, bahan-bahan pembantu, dan bahan-bahan serta suku cadang yang dipakai dalam pemeliharaan alat-alat/mesin
- g) Biaya-biaya yang dibayar dimuka seperti asuransi, bunga, sewa, pajak-pajak, bahan pembantu dan lain-lain.

2) Aset Tetap Berwujud

Aset tetap berwujud adalah aset yang dimiliki perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (seperti tanah, gedung, kendaraan dan lain-lain). Cara mencantumkan didalam neraca adalah aset yang memiliki Umur paling panjang , disusul dengan yang lebih pendek umurnya.

3) Aset Tetap tidak berwujud

Aset Tetap Tidak Berwujud adalah aset yang dimiliki perusahaan atau hak-hak jangka panjang yang dimiliki perusahaan seperti goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta dan lain-lain.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset-aset yang tidak dapat dimasukan dalam kelompok kelompok lain seperti titipan kepada penjual untuk menjamin kontrak, bangunan dalam pelaksanaan, Piutang -piutang jangka panjang, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Adapun akun-akun yang termasuk dalam liabilitas:

- 1) Utang dagang, yaitu Kewajiban yang timbul dari pembelian barang dagangan atau jasa
- 2) Utang wesel adalah kewajiban yang memakai bukti tertulis berupa kesanggupan akan membayar pada tanggal tertentu.
- 3) Taksiran hutang pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk laba periode yang bersangkutan.
- 4) Utang biaya yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi beban tetapi belum diabayar

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas dikurangi seluruh liabilitasnya.

Adapun akun-akun yang termasuk dalam ekuitas :

1) Modal Saham

Modal saham adalah setoran pemilik (pemegang saham) senilai nominal yang tercantum dalam saham.

2) Modal Pemilik

Modal pemilik adalah Setoran modal berupa uang, barang, atau jasa ke perusahaan oleh pemilik.

3) Laba Ditahan

Laba ditahan adalah Laba perusahaan yang tidak dibagikan ke pemilik (pemegang saham). Laba ditahan biasanya ada di perusahaan perseroan.

2. Laporan Laba Rugi Selama Periode

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur – unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal.

**Tabel 2.1 Laporan Laba Rugi**

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	catatan	20X8	20X7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain – lain		xxx	xxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
		xxx	xxx

<b>BEBAN</b>			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain – lain	11	xxx	xxx
<b>JUMLAH BEBAN</b>			
		xxx	xxx
<b>LABA(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
<b>LABA(RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>			
		xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM, (2018)

### 3. Laporan Perubahan Modal

Menurut Afifah (2021:16) laporan perubahan modal dibutuhkan untuk menerangkan keadaan modal yang sesungguhnya dan juga untuk mengetahui dana yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, jumlah investasi, deviden dan distribusi lain kepemilik ekuitas selama periode tersebut.

Berikut adalah komponen yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan perubahan modal menurut Afifah (2021:16) yang diperoleh dari neraca lajur (kertas kerja):

- Modal awal, dilihat dari Laporan Posisi Keuangan.
- Tambahan investasi (jika ada), dapat diperoleh dari jurnal penyesuaian.
- Laba bersih dapat dilihat dari laporan laba rugi sebelah debet.
- Prive* atau deviden yaitu pengambilan pribadi pemilik perusahaan, dilihat dari neraca lajur sebelah debet.
- Rugi perusahaan dapat diambil dari lajur laba rugi sebelah kredit atau hasil dari perhitungan laba rugi

### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan laporan keuangan berisi infomasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif

atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

yang berisi tambahan dan rincian tertentu yang relevan catatan laporan keuangan, memuat :

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga beranfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Menurut Irmah Halimah (2019: 87) catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 2.2 Catatan Atas Laporan Keuangan**

<b>ENTITAS</b> <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> <b>31 DESEMBER 20X8</b>
<p><b>1. UMUM</b> Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat di hadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di jalan xxx, Jakarta Utara.</p> <p><b>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a. Pernyataan Kepetuhan</b> Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</li><li><b>b. Dasar Penyusunan</b> Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</li><li><b>c. Piutang Usaha</b> Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</li><li><b>d. Persediaan</b></li></ul>

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan *overhead*. *Overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. *Overhead* variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

**e. Aset Tetap**

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

**g. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**3. KAS**

**20X8 20X7**

Kas kecil Jakarta – Rupiah

xxx      xxx

**4. GIRO**

**20X8 20X7**

PT. Bank xxx - Rupiah

xxx      xxx

**5. DEPOSIT**

**20X8 20X7**

PT. Bank xxx - Rupiah                        xxx      xxx

Suku bunga – Rupiah 4,50%    5,00%

**6. PIUTANG USAHA**

**20X8 20X7**

Toko A      xxx      xxx

Toko B      xxx      xxx

**Jumlah**      xxx      xxx

**7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA**

**20X8 20X7**

Sewa      xxx      xxx

Asuransi      xxx      xxx

Lisensi dan perizinan      xxx      xxx

**Jumlah**      xxx      xxx

**8. UTANG BANK**

Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20x8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

**9. SALDO LABA**

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

**10. PENDAPATAN PENJUALAN      20X8 20X7**

Penjualan      xxx      Xxx

Retur penjualan      xxx      Xxx

**Jumlah**      xxx      Xxx

**11. BEBAN LAIN – LAIN 20X8 20X7** Bunga pinjaman xxx Xxx

Lain-lain	xxx	Xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
<b>12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>20X8</b>	<b>20X7</b>

Pajak penghasilan    xxx    Xxx

Sumber : SAK EMKM (2018)

#### 2.1.4. Pengertian UMKM

Menurut Purnomo dkk (2020:155), UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM juga merupakan aktivitas usaha kecil yang dapat dikendalikan oleh kelompok maupun kumpulan orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. UMKM berperan penting dalam proses pemerataan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. UMKM menjadi pilar ekonomi bagi Negara, sehingga perlu memperoleh perhatian khusus, kesempatan yang besar dan dukungan yang maksimal dari pemerintah sebagai upaya keberpihakan pada ekonomi rakyat.

UU No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah, terdapat beberapa definisi yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam jenis usaha kecil atau menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 50.000.000 dan Rp 500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 dan Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 500.000.000 dan Rp 10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 dan Rp 50.000.000.000.

**Tabel 2.3. Kategori UMKM**

Kategori Usaha	Kriteria Usaha
Usaha Mikro	Memiliki modal maksimal Rp 50.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
	Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000
Usaha Kecil	Memiliki modal usaha lebih dari Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
	Memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000
Usaha Menengah	Memiliki modal usaha lebih dari Rp 500.000.000 - Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
	Memiliki hasil penjualan tahunan Rp 2.500.000.000 - Rp 50.000.000.000

Sumber: PP No.7/2021 atau PP UMKM (2021)

### **2.1.5. Undang Undang UMKM**

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. UU 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. UU 20 tahun 2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta.

Ketentuan yang ada dalam UU No 20, selain terkait kekayaan bersih dan omset, ada dua hal penting yang perlu di ketahui yaitu:

1. Usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung
2. Tidak memiliki atau menguasai mitra usahanya.

Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
2. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
3. Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam poin 2, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
4. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM telah banyak dilakukan, namun penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti lokasi dan perbedaan lainnya terkait permasalahan yang ada pada Laporan

Keuangan UMKM. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya tentang Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu :

Purba (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam. Hasil penelitian yang di dapat adalah dapat diketahui bahwa setiap pengelola atau pemilik UMKM memiliki kreatifitas sendiri-sendiri dalam menyusun catatan-catatan usahanya, namun dalam menyusun catatan pembukuan mereka tidak memakai ilmu akuntansi sebagai dasar pembukuan, mereka melakukan pembukuan secara sederhana. Meskipun dalam pembukuan yang dilakukan relatif sederhana, namun pengelola atau pemilik UMKM telah menggunakan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini diperoleh dari bukti-bukti dokumen dan pengakuan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan narasumber.

Uno dkk (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo di Kota Gorontalo). Hasil penelitian yang di dapat adalah Selama hampir 5 tahun dijalankan, Rumah Karawo belum melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Selain itu, pemilik Rumah Karawo juga berpendapat bahwa usahanya belum perlu melakukan penyusunan laporan keuangan yang baku dikarenakan usahanya belum membutuhkan pembiayaan dari bank konvensional, sebagaimana yang kita ketahui laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel merupakan salah satu syarat diterimanya permohonan kredit dari suatu badan usaha.

Amani (2018) melakukan penelitian tentang Penerapan SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM. Hasil penelitian yang di dapat adalah UMKM UD Dua Putri Solehah menunjukkan entitas termotivasi menyusun laporan keuangan serta menerapkan standar sesuai aturan yang berlaku. Ini merupakan kebijakan yang diambil oleh manajer untuk peningkatan kinerja dan pengembangan usaha agar tercapai tujuan perusahaan yaitu menjadi sebuah UMKM yang eksis dan berkembang serta mampu berkompetisi khususnya di Probolinggo dan sekitarnya. Selain itu

motivasi ini juga didukung keinginan entitas untuk melaksanakan kepatuhan sesuai standar dan aturan IAI yang sudah diterbitkan per 1 Januari 2018 yaitu SAK EMKM. Manfaat Laporan keuangan ini untuk pengajuan kredit ke perbankan sebagai sarana memperbesar modal.

Lailiya (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Kesiapan Tentang SAK EMKM Pada Usaha Kecil di Yogyakarta. Hasil penelitian yang di dapat adalah terdapat keberagaman pencatatan laporan keuangan dalam keenam usaha yang diteliti yaitu empat usaha yang dinilai siap dan terdapat dua usaha yang dinilai tidak siap untuk menerapkan SAK EMKM. Empat usaha yang dinilai siap yaitu usaha Logam Jaya, Batik Indah Rara Djongrang, Batik Luwes dan SP Alumunium karena memiliki pencatatan laporan keuangan yang memenuhi salah satu faktor yang menjadi penilaian kesiapan usaha dan telah memisahkan harta pribadi dengan usaha. Dua dari usaha yang lain yang dinilai tidak siap untuk menerapkan SAK EMKM yaitu usaha Bakpia Pathuk 75 dan Wayang Hadisukirno karena hanya memenuhi kedua faktor dari penilaian kesiapan usaha dalam menerapkan SAK EMKM. Dari hasil penelitian, dapat diketahui tingkat kesiapan usaha tertinggi untuk menerapkan SAK EMKM yaitu usaha Batik Indah Rara Djongrang dan SP Alumunium karena telah memenuhi empat faktor, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dimiliki oleh usaha ini sudah sangat baik. Laporan keuangan perusahaan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi karena didukung denganadanya bukti dokumentansi berupa laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi, sedangkan usaha yang tidak siap untuk menerapkan SAK EMKM dibanding ke empat usaha lainnya, yaitu usaha Wayang Hadisukirno. Pada usaha Wayang Hadisukirno meskipun telah memenuhi dua faktor penilaian kesiapan, tetapi pencatatan laporan keuangan masih belum rapi dan masih tercampurnya harta pribadi dengan usaha.

Nurlaila (2018) melakukan penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Sukma Cipta Ceramic Dinoyo Malang. Hasil penelitian yang di dapat adalah Pencatatan laporan pembukuan yang dilakukan oleh Sukma Cipta Ceramic masih sangat sederhana dan manual. Pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui pemasukan kas seperti menerima pesanan keramik dan mengetahui pengeluaran kas seperti membeli bahan baku, membayar listrik, air, dan telepon, dan membayar gaji pegawai. Meskipun pencatatannya sudah

bagus, tetapi belum sesuai dengan sistem akuntansi yang ada. Pencatatan dibuat berdasarkan pemahaman pemilik dan karyawannya. laporan pembukuan di Sukma Cipta Ceramic terdiri dari pemasukan dan pengeluaran transaksi dan pencatatan beban-beban seperti beban gaji, beban listrik, air dan telepon. Dalam SAK EMKM ada beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk Menyusun laporan keuangan Sukma Cipta Ceramic. Belum adanya pemisahan antara aset lancar dan aset tidak lancar, dan kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Laporan pembukuan Sukma Cipta Ceramic belum adanya pemisahan antara pendapatan dan beban dalam laporan pembukunya. Sedangkan dalam SAK EMKM menjelaskan bahwa ada tiga komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu**

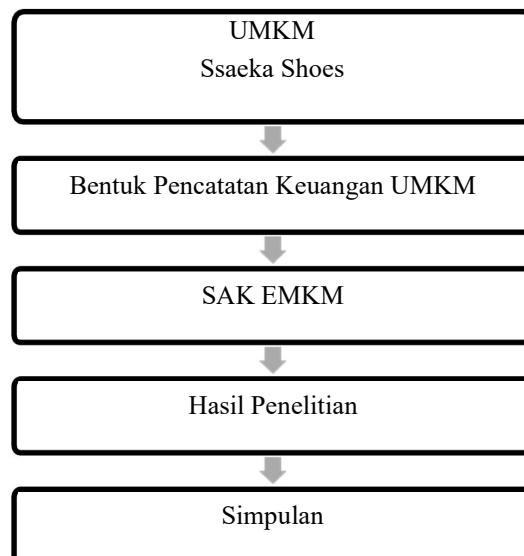
No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Purba (2019)	Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam.	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM	Setiap pengeola atau pemilik UMKM memiliki kreatifitas sendiri-sendiri dalam menyusun catatan-catatan usahanya, namun dalam menyusun catatan pembukuan mereka tidak memakai ilmu akuntansi sebagai dasar pembukuan, mereka melakukan pembukuan secara sederhana.
2	Uno dkk (2019)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo)	Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK EMKM	Selama hampir 5 tahun dijalankan, Rumah Karawo belum melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang berlaku.
3	Amani (2018)	Penerapan SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM.	SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	UMKM UD Dua Putri Solehah menunjukkan entitas termotivasi menyusun laporan keuangan serta menerapkan standar sesuai aturan yang berlaku.
4	Lailiya (2018)	Analisis Kesiapan Tentang SAK EMKM Pada Usaha Kecil di Yogyakarta.	Kesiapan UMKM Dalam Menerapkan Tentang SAK EMKM	Terdapat keberagaman pencatatan laporan keuangan dalam keenam usaha yang diteliti yaitu empat usaha yang dinilai siap dan terdapat dua usaha yang dinilai tidak siap untuk menerapkan

				SAK EMKM. kinerja usaha yang tercermin dalam laporan keuangan
5	Nurlaila (2018)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Sukma Cipta Ceramic Dinoyo Malang.	Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM	Pencatatan laporan pembukuan yang dilakukan oleh Sukma Cipta Ceramic masih sangat sederhana dan manual. Pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui pemasukan kas seperti menerima pesanan keramik dan mengetahui pengeluaran kas seperti membeli bahan baku, membayar listrik, air, dan telepon, dan membayar gaji pegawai. Meskipun pencatatannya sudah bagus, tetapi belum sesuai dengan sistem akuntansi yang ada.

Sumber: Penelitian Terkait (2023)

## 2.1. Kerangka Konseptual

Penerapan akuntansi pada UMKM adalah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan berdasarkan SAK EMKM agar dapat menyajikan laporan keuangan yang baik sehingga akan membantu pelaku UMKM untuk mengetahui informasi keuangan dari usaha yang dijalankan. Kerangka konseptual yang di gambarkan dalam penyusunan penelitian ini, agar penelitian terperinci dan terarah. Guna memudahkan dan memahami inti pemikiran Peneliti, maka perlu kiranya dibuat kerangka konseptual dari masalah yang diangkat, di bawah ini adalah bagan dari kerangka konseptual penelitian :



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Peneliti (2023)